



# DARI ILMU PERANG MENUJU ILMU PERTAHANAN: GENEALOGI, TRANSFORMASI EPISTEMOLOGIS, DAN INSTITUSIONALISASI ILMU PERTAHANAN DI INDONESIA

*From Military Science to Defense Science: Genealogy, Epistemological Transformation, and The  
Institutionalization of Defense Science in Indonesia*

**Ruth Lumban Gaol dan Muhammad Padhil**

Program Studi Sejarah Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan  
Republik Indonesia

Email: [Chelsealumbangaol12@gmail.com](mailto:Chelsealumbangaol12@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel ini menganalisis sejarah perkembangan ilmu pertahanan di Indonesia sebagai proses transformasi epistemik dan institusional, bukan semata-mata sebagai kronologi pembentukan lembaga pendidikan pertahanan. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan empat tahap: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, serta memadukan sejarah intelektual dengan analisis institusional. Argumen utama penelitian adalah bahwa ilmu pertahanan berkembang melalui perluasan objek pengetahuan dari perang dan penggunaan kekuatan militer menuju strategi, keamanan nasional, teknologi, manajemen, diplomasi, dan keseluruhan kapasitas negara untuk mempertahankan eksistensi serta kepentingan nasional. Secara genealogis, tradisi Thucydides, Sun Tzu, dan Clausewitz menunjukkan rasionalisasi pengetahuan perang dan hubungan antara kekuatan, strategi, serta politik. Pada abad modern, perkembangan strategic studies, security studies, dan Revolution in Military Affairs memperluas ruang epistemik pertahanan. Dalam konteks Indonesia, Seskoad, Seskoal, dan Seskoau berfungsi sebagai ruang awal produksi dan transmisi pengetahuan strategis profesional, sedangkan pendirian Universitas Pertahanan pada 2009 menandai pergeseran menuju akademisasi universitas. Artikel ini menemukan bahwa kematangan ilmu pertahanan tidak cukup ditentukan oleh pengakuan administratif suatu program studi, tetapi oleh kemampuan membangun objek kajian, komunitas ilmiah, metode, teori, publikasi, kritik akademik, serta relasi produktif antara pengalaman militer dan pengetahuan sipil. Novelty penelitian terletak pada konseptualisasi perkembangan ilmu pertahanan Indonesia sebagai konvergensi ilmu perang, ilmu militer, studi strategi, studi keamanan, teknologi dan filsafat ilmu pertahanan dalam paradigma interdisipliner dan transdisipliner.

Kata kunci: ilmu pertahanan; sejarah intelektual; ilmu perang; pendidikan militer; Universitas Pertahanan; epistemologi.

#### ABSTRACT

*This article examines the development of defence science in Indonesia as a process of epistemic and institutional transformation rather than merely a chronology of defence-education institutions. Using historical method through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, the study combines intellectual history with institutional analysis. It argues that defence science emerged through an expansion of the object of knowledge from war and the employment of military force toward strategy, national security, technology, management, diplomacy, and the broader capacity of the state to preserve its existence and national interests. Genealogically, Thucydides, Sun Tzu, and Clausewitz represent major stages in the rationalisation of knowledge about war and the relationship between force, strategy, and politics. Modern strategic studies, security studies, and the Revolution in Military Affairs subsequently widened the epistemic field of defence. In Indonesia, the service command and staff colleges functioned as early sites for producing and transmitting professional strategic knowledge, while the establishment of the Indonesia Defence University in 2009 marked a transition toward university-based academic institutionalisation. The article finds that the maturity of defence science cannot be measured only through administrative recognition; it depends on the development of research objects, scholarly communities, methods, theories, publications, academic criticism, and productive civil-military knowledge relations. The study's novelty lies in conceptualising Indonesian defence science as a convergence of war studies, military science, strategic studies, security studies, technology, and philosophy of defence science within an interdisciplinary and transdisciplinary paradigm.*

*Keywords: defence science; intellectual history; war studies; military education; Indonesia Defence University; epistemology.*

#### 1. PENDAHULUAN

Pertahanan merupakan salah satu fungsi paling tua dari organisasi politik. Namun, usia praktik mempertahankan komunitas politik tidak identik dengan usia ilmu pertahanan sebagai disiplin akademik. Manusia telah berperang jauh sebelum perang diperlakukan sebagai objek penelitian sistematis; tentara telah membangun doktrin jauh sebelum universitas mengembangkan kajian pertahanan; dan negara telah menyusun strategi sebelum terdapat komunitas akademik yang secara khusus menguji asumsi, konsep, metode, dan konsekuensi kebijakan pertahanan. Karena itu, sejarah ilmu

pertahanan perlu dibedakan dari sejarah perang, sejarah militer, dan sejarah institusi pertahanan, meskipun keempatnya saling berhubungan.

Artikel awal mengenai perkembangan ilmu pertahanan di Indonesia telah mengidentifikasi perubahan penting dari pemahaman pertahanan sebagai urusan eksklusif militer menuju bidang multidimensional. Ia juga menempatkan pembentukan Universitas Pertahanan pada 2009, perkembangan sekolah staf dan komando, serta kebutuhan legitimasi akademik sebagai tonggak penting. Kerangka tersebut bernilai sebagai sejarah kelembagaan, tetapi masih menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: kapan pengetahuan tentang perang berubah menjadi pengetahuan ilmiah tentang pertahanan; bagaimana objek, metode dan komunitas keilmuannya berubah; dan apakah pendirian universitas dengan sendirinya berarti lahirnya suatu disiplin ilmu?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena perkembangan internasional menunjukkan bahwa defence studies tidak identik dengan military studies. Buzan dan Hansen (2009) memperlihatkan bahwa International Security Studies berkembang melalui perubahan tema, aktor, ancaman dan batas disiplin sejak Perang Dunia II. Pergeseran dari konsep perang dan pertahanan menuju keamanan membuka kajian terhadap ancaman militer maupun nonmiliter, kohesi masyarakat, kerentanan politik, ekonomi, dan berbagai isu yang sebelumnya berada di luar studi militer. Sementara itu, Defence Studies kontemporer menampung war studies, strategic theory, policy studies, critical security, transformasi kekuatan, cyber defence, hingga dimensi politik, ekonomi dan techno-scientific dari perang (Taylor & Francis, 2026).

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa disiplin pertahanan berkembang melalui proses perluasan sekaligus integrasi. Deschaux-Dutard (2021) menunjukkan bahwa penelitian pertahanan saat ini menggunakan metode dari ilmu politik, sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi dan hukum publik. Dengan demikian, pertahanan bukan sekadar tema yang dipelajari banyak disiplin secara paralel, melainkan arena masalah

yang menuntut cross-fertilization antarmetode. Konsekuensinya, pertanyaan mengenai identitas ilmu pertahanan tidak dapat dijawab hanya dengan menyebut daftar mata kuliah atau struktur organisasi sebuah universitas.

Dalam konteks Indonesia, problem ini memiliki kekhasan historis. Sebelum berdirinya Universitas Pertahanan, produksi pengetahuan strategis telah berlangsung di lingkungan pendidikan militer melalui Seskoad, Seskoal dan Seskoau. Pengetahuan tersebut terutama diarahkan pada profesi, doktrin, operasi, kepemimpinan dan kebutuhan organisasi militer. Pendirian Universitas Pertahanan kemudian menciptakan ruang baru tempat militer dan sipil dapat mempelajari pertahanan melalui perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, manajemen, teknologi dan keamanan. Pendidikan dan penelitian bahkan menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia melalui kerja sama antar-lembaga pendidikan pertahanan (Midhio & Priyono, 2019).

Di titik inilah buku Mhd Halkis, *Filsafat Ilmu Pertahanan: Suatu Pengantar*, menyediakan kerangka yang penting. Halkis (2022) tidak menempatkan ilmu pertahanan hanya sebagai perluasan administrasi pendidikan militer. Ia berupaya meletakkan bidang pertahanan di bawah refleksi filsafat ilmu: ontologi menjawab apa yang dipelajari; epistemologi menjawab bagaimana pengetahuan pertahanan dibangun dan dibenarkan; sedangkan aksiologi mempertanyakan nilai, tujuan, dan penggunaan pengetahuan serta kekuatan pertahanan. Ia juga menekankan bahwa kebutuhan pertahanan yang kompleks membuat bidang ini bersifat interdisciplinary, cross-disciplinary, bahkan secara praktis bergerak menuju paradigma transdisipliner.

Kerangka tersebut memungkinkan penulisan sejarah ilmu pertahanan dengan cara yang berbeda. Alih-alih memulai sejarah pada pendirian institusi modern, penelitian ini membaca perkembangan ilmu pertahanan sebagai genealogi pengetahuan. Genealogi di sini tidak dimaksudkan sebagai garis evolusi yang lurus dan deterministik. Ia dipakai untuk melacak perubahan pusat perhatian: dari bagaimana memenangkan perang,

bagaimana mengorganisasi militer, bagaimana menghubungkan tujuan politik dengan penggunaan kekuatan, bagaimana mengelola keamanan negara, hingga bagaimana mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman yang berubah.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya pembahasan yang secara bersamaan menghubungkan sejarah intelektual perang, perkembangan pendidikan militer, perluasan security studies, dan institusionalisasi universitas ilmu pertahanan di Indonesia. Literatur yang ada cenderung bergerak pada salah satu sisi: sejarah pendidikan militer, hubungan sipil-militer, kebijakan pertahanan, atau legitimasi ontologis-epistemologis ilmu pertahanan. Akibatnya, hubungan antara perubahan konsep dengan perubahan institusi belum cukup dijelaskan.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini mengajukan tesis bahwa perkembangan ilmu pertahanan Indonesia merupakan proses transformasi epistemik melalui tiga lapisan yang saling berhubungan: pertama, rasionalisasi pengetahuan perang menjadi strategi dan ilmu militer; kedua, perluasan objek dari militer menuju keamanan, teknologi dan instrumen kekuasaan nasional; ketiga, akademisasi pengetahuan tersebut melalui institusi pendidikan tinggi, penelitian dan komunitas ilmiah. Pendirian Universitas Pertahanan karena itu dipahami bukan sebagai titik nol ilmu pertahanan, melainkan sebagai titik institusionalisasi penting dari proses historis yang lebih panjang.

Tujuan penelitian adalah: (1) merekonstruksi genealogi intelektual ilmu pertahanan dari pemikiran perang menuju defence studies; (2) menjelaskan peran pendidikan militer Indonesia dalam pembentukan komunitas pengetahuan strategis; (3) menganalisis arti pendirian Universitas Pertahanan bagi akademisasi pertahanan; dan (4) merumuskan karakter epistemologis ilmu pertahanan Indonesia sebagai bidang interdisipliner dan transdisipliner. Kontribusi artikel terletak pada pemindahan fokus dari sejarah organisasi menuju sejarah transformasi pengetahuan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah deskriptif-analitis yang dipadukan dengan pendekatan sejarah intelektual dan analisis institusional. Metode sejarah dipilih karena objek penelitian bukan hanya urutan peristiwa, tetapi perubahan makna, konsep, lembaga dan praktik produksi pengetahuan pertahanan. Tahapan penelitian mengikuti empat langkah pokok historiografi: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (Gottschalk, 1986; Kuntowijoyo, 2003; Sjamsuddin, 2012).

Pada tahap heuristik, sumber dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, sumber konseptual klasik dan modern mengenai perang, strategi dan keamanan, termasuk tradisi Thucydides, Sun Tzu, Clausewitz, strategic studies dan security studies. Kedua, sumber institusional mengenai pendidikan pertahanan Indonesia, terutama perkembangan sekolah staf dan komando serta Universitas Pertahanan. Ketiga, literatur filsafat dan metodologi defence studies yang dipakai untuk menilai pembentukan objek, metode dan batas disiplin. Buku Halkis (2022) diperlakukan sebagai sumber konseptual utama untuk membaca konstruksi filsafat ilmu pertahanan Indonesia, bukan sebagai satu-satunya sumber historis.

Kritik eksternal dilakukan dengan memeriksa identitas publikasi, tahun, penerbit, DOI atau informasi bibliografis yang dapat diverifikasi. Kritik internal diarahkan pada posisi penulis, jenis klaim, konsistensi argumentasi dan kesesuaian antara bukti dengan kesimpulan. Langkah ini penting karena sebagian historiografi institusional cenderung menggunakan narasi peringatan atau legitimasi organisasi, sedangkan artikel ilmiah menuntut pembedaan antara fakta pendirian lembaga, interpretasi tentang pengaruh lembaga, dan klaim mengenai lahirnya suatu disiplin.

Interpretasi dilakukan melalui periodisasi analitis. Perubahan tidak disusun hanya berdasarkan tahun, melainkan berdasarkan pergeseran objek pengetahuan: perang,

organisasi militer, strategi, keamanan, teknologi, dan pertahanan negara. Data kemudian dibaca melalui tiga indikator institusionalisasi disiplin, yaitu keberadaan objek dan problem penelitian yang relatif dapat dikenali, komunitas serta institusi produksi pengetahuan, dan mekanisme validasi melalui metode, publikasi serta kritik ilmiah. Historiografi akhir disusun secara kronologis-tematik agar hubungan antara perkembangan global dan trajektori Indonesia dapat terlihat tanpa menganggap Indonesia sekadar meniru model asing.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Dari Perang sebagai Peristiwa menuju Perang sebagai Objek Pengetahuan

Akar jauh ilmu pertahanan berada pada perubahan cara manusia memahami perang. Dalam tradisi klasik, arti penting Thucydides bukan karena ia menciptakan defence studies dalam pengertian modern, tetapi karena ia membantu mengubah perang menjadi objek analisis yang dapat diteliti melalui bukti, sebab-akibat, kepentingan, ketakutan, kekuasaan, keputusan dan konsekuensi politik. Halkis (2022) menempatkan Thucydides sebagai figur penting dalam sejarah ilmu strategi karena karya tentang Perang Peloponnesia menggunakan standar ketidakberpihakan, pengumpulan bukti dan analisis kausal. Pengalaman perang dengan demikian dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan yang diwariskan.

Transformasi tersebut mengandung konsekuensi epistemologis. Jika perang hanya dipahami sebagai rangkaian kepahlawanan, kemenangan dan kekalahan, sejarah berfungsi terutama sebagai ingatan. Ketika perang dianalisis untuk menemukan pola keputusan, kesalahan, dilema dan hubungan antara politik dengan kekerasan, sejarah memperoleh fungsi strategis. Halkis menekankan bahwa pembelajaran atas keberhasilan dan kegagalan masa lalu membantu pengambil keputusan memahami dinamika politik dalam krisis dan perang. Di sini terlihat embrio hubungan antara historiografi dan pendidikan strategis.

Sun Tzu menambahkan dimensi yang berbeda. *The Art of War* menggeser pusat perhatian dari keberanian dalam pertempuran menuju pengetahuan tentang diri, lawan, situasi, informasi, tipu daya, waktu dan efisiensi penggunaan kekuatan. Kemenangan strategis tidak selalu identik dengan penghancuran fisik lawan. Warisan ini penting bagi ilmu pertahanan modern karena menunjukkan bahwa tujuan politik dapat dicapai melalui kombinasi instrumen, persepsi dan pengendalian perilaku lawan. Intelijen, diplomasi, deterrence dan operasi informasi dapat dibaca sebagai perluasan logika strategis tersebut, meskipun bentuk teknologinya berbeda.

Clausewitz kemudian memberikan formulasi modern yang menentukan dengan menempatkan perang dalam relasinya dengan politik. Signifikansinya bagi ilmu pertahanan bukan hanya ungkapan bahwa perang merupakan kelanjutan politik dengan sarana lain, melainkan penegasan bahwa penggunaan kekuatan harus dipahami melalui tujuan politik, ketidakpastian, friksi, moral, organisasi dan interaksi dengan lawan. Dengan demikian, objek analisis tidak lagi berhenti pada taktik. Rantai analitis berkembang dari pertempuran menuju perang, strategi, politik dan kepentingan negara.

Tiga tradisi tersebut tidak membentuk garis evolusi sederhana. Namun, jika dibaca sebagai sejarah problem, terlihat perubahan penting: pengalaman perang menjadi sumber pengetahuan; pengetahuan tersebut disusun sebagai prinsip strategis; dan strategi ditempatkan dalam kerangka tujuan politik. Pada titik inilah dasar intelektual ilmu pertahanan mulai dapat dibedakan dari sekadar keterampilan tempur.

### 3.2 Dari Ilmu Militer menuju Strategic Studies dan Security Studies

Modernisasi negara dan angkatan bersenjata menghasilkan diferensiasi pengetahuan. Organisasi militer memerlukan pengetahuan mengenai personel, logistik, teknologi, komando, operasi, doktrin dan pendidikan. Ilmu militer tumbuh berdekatan dengan profesi militer karena objek utamanya adalah bagaimana kekuatan bersenjata dibentuk dan digunakan. Akan tetapi, persoalan negara tidak dapat direduksi pada

organisasi militer. Ketika tujuan politik, ekonomi perang, diplomasi, teknologi dan mobilisasi nasional masuk ke dalam kalkulasi, strategi berkembang menuju grand strategy.

Grand strategy memperluas pertanyaan dari 'bagaimana militer memenangkan perang' menjadi 'bagaimana negara menghubungkan tujuan dengan seluruh instrumen kekuasaan yang tersedia'. Perubahan ini penting karena kekuatan militer menjadi salah satu sarana di antara diplomasi, ekonomi, teknologi, informasi dan legitimasi politik. Dengan demikian, pengetahuan pertahanan bergerak dari military-centric menuju state-centric, sekalipun institusi militer tetap merupakan aktor sentral dalam penggunaan kekerasan terorganisasi.

Setelah Perang Dunia II, security studies berkembang sebagai arena akademik yang semakin luas. Buzan dan Hansen (2009) menunjukkan bahwa International Security Studies tumbuh dari perdebatan mengenai perlindungan negara terhadap ancaman internal dan eksternal, tetapi kemudian batasnya terus diperdebatkan. Pergeseran konseptual menuju 'security' memungkinkan masuknya isu yang lebih luas daripada defence atau war. Perubahan ini bukan berarti studi pertahanan kehilangan relevansi, tetapi menunjukkan bahwa keamanan, perang dan pertahanan memiliki wilayah tumpang tindih sekaligus objek yang tidak sepenuhnya sama.

Perkembangan kontemporer mempertegas pluralitas tersebut. Defence Studies menerima penelitian teoritis dan empiris mengenai emergent warfare, strategic theory, kebijakan pertahanan, critical security, cyber defence, transformasi kekuatan, perang laut, counter-insurgency dan strategi nuklir. Orientasi cross-disciplinary ini menunjukkan bahwa pertahanan telah menjadi problem ilmiah yang membutuhkan dialog antara ilmu sosial, humaniora, sains dan teknologi. Deschaux-Dutard (2021) bahkan menempatkan sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, hukum publik serta metode kuantitatif dan kualitatif sebagai bagian dari perangkat penelitian pertahanan.

Konsekuensi teoretisnya adalah bahwa 'ilmu pertahanan' lebih tepat dipahami sebagai medan integratif yang memiliki objek masalah bersama daripada disiplin tertutup dengan satu metode tunggal. Ia menjadi ilmiah bukan karena semua penelitiannya memakai metodologi yang sama, tetapi karena klaim pertahanan dapat diuji melalui prosedur metodologis yang sesuai dengan problemnya. Pertanyaan mengenai postur kekuatan dapat memerlukan analisis kuantitatif; sejarah doktrin membutuhkan kritik sumber; hubungan sipil-militer memerlukan teori politik dan sosiologi; teknologi senjata membutuhkan ilmu teknik; sementara legitimasi penggunaan kekuatan memerlukan hukum dan etika.

### 3.3 Revolusi Militer, RMA, dan Perluasan Ruang Pertahanan

Teknologi merupakan salah satu pendorong utama perubahan pengetahuan pertahanan. Revolusi militer pada berbagai periode mengubah hubungan antara organisasi, senjata, doktrin, logistik dan negara. Dalam konstruksi Halkis (2022), perkembangan teknologi militer pada abad modern bergerak menuju Revolution in Military Affairs (RMA), kemudian teknologi informasi dan perang informasi mendorong transformasi pertahanan. Artinya, perubahan alat perang tidak berdiri sendiri; teknologi baru menuntut perubahan organisasi, konsep operasi dan cara menghasilkan pengetahuan.

RMA berguna sebagai contoh bahwa inovasi pertahanan merupakan kombinasi teknologi dan konsep. Studi Triantama dan Pangestu (2020) mengenai Singapura menunjukkan bagaimana RMA dipakai untuk menjawab strategic disadvantage. Pelajarannya bagi historiografi ilmu pertahanan adalah bahwa perubahan material dapat mendorong perubahan epistemik: negara perlu mengembangkan kategori, model, doktrin dan metode baru untuk memahami kemampuan yang sebelumnya tidak tersedia.



Pada abad ke-21, ruang siber, artificial intelligence, autonomous systems, sensor, data dan informasi semakin mengaburkan pemisahan antara masa damai dan konflik, sipil dan militer, serta ruang fisik dan digital. Kajian mutakhir mengenai teknologi disruptif dalam bidang pertahanan menekankan bahwa klaim disrupti itu sendiri bersifat performatif, sehingga narasi tentang teknologi baru turut membentuk pilihan kebijakan dan institusi, bukan sekadar mencerminkan fakta teknis semata (Csernaton & Martins, 2023). Studi lain menunjukkan bahwa tata kelola teknologi disruptif berlangsung pada tiga aras yang saling berkaitan, yaitu otoritas global, negara dan aktor lokal, sehingga ilmu pertahanan perlu membaca inovasi teknologi sebagai persoalan tata kelola berlapis, bukan hanya persoalan kapabilitas (Chua, 2023). Konteks Indonesia memperlihatkan dinamika serupa, misalnya pada ancaman siber yang menuntut kajian strategi pertahanan yang mengaitkan aspek teknis dengan kebijakan nasional (Darumaya dkk., 2023). Karena teknologi tersebut sebagian besar berkembang melalui ekosistem sipil, ilmu pertahanan semakin bergantung pada hubungan dengan universitas, industri dan komunitas teknologi. Dengan demikian, transdisiplin bukan sekadar pilihan pedagogis, melainkan konsekuensi struktur masalah pertahanan modern.

Namun determinisme teknologi harus dihindari. Perubahan karakter perang tidak berarti bahwa faktor politik, manusia, organisasi dan sejarah kehilangan relevansi. Teknologi memperoleh arti strategis ketika terhubung dengan doktrin, tujuan, kapasitas organisasi dan konteks politik. Karena itu, sejarah ilmu pertahanan perlu mempelajari interaksi antara perubahan material dengan perubahan konseptual, bukan menyamakan modernisasi alat utama sistem senjata dengan kemajuan ilmu pertahanan.

3.4 Genealogi Pendidikan Strategis Indonesia: Sesko sebagai Komunitas Pengetahuan Profesional

Sebelum Universitas Pertahanan berdiri, pendidikan strategis Indonesia telah berkembang dalam institusi militer. Seskoad didirikan pada 1951, Seskoal pada 1962, dan Seskoau pada 1963. Ketiganya memiliki karakter matra dan kebutuhan profesional yang berbeda, tetapi sama-sama berfungsi mendidik perwira untuk tanggung jawab staf, komando, doktrin dan pemikiran strategis. Kajian historiografis atas Seskoad, misalnya, menunjukkan bahwa lembaga ini sejak dekade 1960-an dan 1970-an telah berfungsi sebagai ruang penggalan dan pengujian doktrin melalui mekanisme seminar Angkatan Darat, sehingga perannya melampaui pendidikan teknis-militer semata dan menyentuh perumusan doktrin serta kebijakan nasional (Rachman dkk., 2020). Karena itu, sejarah ilmu pertahanan Indonesia tidak dapat dimulai pada 2009 tanpa kehilangan lapisan institusional yang lebih tua.

Secara epistemologis, Sesko dapat dipahami sebagai komunitas pengetahuan profesional. Pengetahuan yang diproduksi di dalamnya lahir dari interaksi doktrin, pengalaman operasi, pendidikan, studi kasus, perencanaan dan evaluasi. Kekuatan model ini terletak pada kedekatannya dengan praktik. Akan tetapi, pengetahuan profesional tidak otomatis sama dengan disiplin akademik. Disiplin akademik menuntut ruang kritik yang lebih terbuka, publikasi, perdebatan teori, replikasi atau penilaian sejawat, serta keterhubungan dengan literatur di luar organisasi.

Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk membuat dikotomi antara 'militer' dan 'ilmiah'. Justru sejarah professional military education menunjukkan bahwa profesi militer modern membutuhkan pendidikan akademik untuk menghadapi kompleksitas politik dan strategis. Fisher (2022), misalnya, memperlihatkan bahwa PME juga perlu merefleksikan bagaimana perang dibingkai dalam tujuan pendidikan dan bagaimana konsekuensi kekerasan dibahas di ruang kelas. Perbandingan lintas negara juga menunjukkan bahwa hubungan antara akademi militer dan otoritas pendidikan sipil terus bergeser menuju integrasi akreditasi akademik, meskipun pola dan kecepatannya

berbeda antarnegara (Libel & Ateş, 2025). Dengan demikian, pendidikan militer merupakan salah satu jembatan antara pengalaman profesi dengan refleksi akademik.

Dalam konteks Indonesia, transformasi pasca-Reformasi juga memberi arti baru pada hubungan tersebut. Demokratisasi, kontrol sipil dan perubahan lingkungan strategis menuntut pengetahuan pertahanan yang tidak hanya berasal dari perspektif internal organisasi militer. Laksamana (2011) menunjukkan pentingnya dinamika hubungan sipil-militer Indonesia setelah Reformasi. Literatur hubungan sipil-militer kontemporer juga mengingatkan bahwa politisasi militer tidak selalu berasal dari niat aktor militer itu sendiri, melainkan dapat muncul dari struktur kelembagaan pemisahan kekuasaan yang memberi ruang bagi otoritas sipil untuk menariknya ke ranah politik (Banerjee & Webeck, 2024). Bagi ilmu pertahanan, implikasinya adalah kebutuhan memperluas komunitas epistemik: militer, akademisi sipil, birokrasi, industri, ilmuwan teknologi dan masyarakat perlu memiliki ruang dialog tanpa menghilangkan profesionalisme masing-masing.

Dengan perspektif tersebut, Sesko bukan sekadar 'pendahulu' Unhan secara organisatoris. Ia merupakan salah satu lapisan historis produksi pengetahuan pertahanan. Perubahan menuju universitas kemudian mengubah mekanisme legitimasi: dari pengetahuan yang terutama divalidasi melalui kebutuhan profesi dan doktrin menuju pengetahuan yang juga harus berhadapan dengan standar metodologi, publikasi, peer review dan perdebatan lintas disiplin.

### 3.5 Universitas Pertahanan 2009: Dari Pendidikan Profesional menuju Akademisasi Universiter

Pendirian Universitas Pertahanan merupakan tonggak institusional yang menentukan. Berdasarkan informasi institusional Universitas Pertahanan, pembentukannya ditetapkan melalui Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan diresmikan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada 11 Maret 2009. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 kemudian memberi dasar bagi kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang secara akademik berada dalam pembinaan kementerian pendidikan dan secara fungsional berkaitan dengan Kementerian Pertahanan.

Arti sejarahnya bukan hanya lahirnya organisasi baru. Universitas mengubah ekologi pengetahuan. Pertahanan dapat dipelajari oleh militer dan sipil melalui kurikulum, penelitian, tesis, disertasi, seminar, jurnal, kerja sama internasional dan pengembangan program studi. Midhio dan Priyono (2019) menunjukkan bahwa pendidikan dan penelitian Universitas Pertahanan juga berfungsi dalam diplomasi pertahanan melalui kerja sama dengan institusi pertahanan negara lain. Dengan demikian, universitas menjadi simpul antara produksi pengetahuan nasional dan jaringan epistemik internasional.

Akademisasi juga memperluas objek. Strategi dan manajemen pertahanan, keamanan nasional, diplomasi, bela negara dan teknologi pertahanan tidak dapat diselesaikan oleh satu rumpun ilmu. Dalam kata pengantar Filsafat Ilmu Pertahanan, Halkis (2022) secara eksplisit menyebut perkembangan Universitas Pertahanan sebagai interdisciplinary bahkan cross-disciplinary karena kebutuhan pertahanan negara sangat kompleks. Filsafat ilmu kemudian diajukan sebagai payung untuk menilai hubungan ontologi, epistemologi dan aksiologi berbagai bidang tersebut.

Di sinilah perlu dibedakan institusionalisasi dengan kematangan disiplin. Pendirian universitas merupakan kondisi penting, tetapi tidak cukup. Sebuah disiplin memperoleh daya tahan ketika memiliki problem penelitian yang produktif, teori yang diperdebatkan, metodologi yang transparan, jurnal yang kredibel, komunitas ilmiah, pendidikan berjenjang, jejaring internasional dan kemampuan mengoreksi dirinya sendiri. Dengan kata lain, universitas menyediakan institusi; komunitas akademiklah yang harus terus membangun disiplin.

Perkembangan jurnal pertahanan Indonesia memperlihatkan proses tersebut. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, misalnya, menjadi platform bagi penelitian pertahanan dan bela negara serta telah memperoleh akreditasi nasional. Kehadiran jurnal penting bukan hanya sebagai tempat dokumentasi, melainkan sebagai mekanisme seleksi argumentasi melalui peer review. Semakin terbuka suatu bidang terhadap kritik metodologis dan perbandingan internasional, semakin kuat kapasitasnya sebagai ilmu.

### 3.6 Filsafat Ilmu Pertahanan: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Pertanyaan mengenai status ilmu pertahanan akhirnya membawa analisis pada filsafat ilmu. Halkis (2022) mendefinisikan Filsafat Ilmu Pertahanan sebagai penggunaan esensi filsafat terhadap materi bidang pertahanan sehingga filsafat bukan hanya payung, tetapi fondasi pengembangan ilmu dalam konteks pertahanan negara. Posisi ini penting karena heterogenitas bidang pertahanan menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menyatukannya.

Secara ontologis, ilmu pertahanan tidak cukup didefinisikan sebagai ilmu tentang militer. Objek materialnya dapat meliputi negara, ancaman, kepentingan nasional, kekuatan nasional, organisasi pertahanan, masyarakat, teknologi dan lingkungan strategis. Objek formalnya adalah problem mempertahankan eksistensi, kedaulatan, kepentingan dan kemampuan negara menghadapi ancaman serta risiko. Formulasi ini memungkinkan isu militer dan nonmiliter berada dalam satu kerangka tanpa menyamakan semua masalah publik sebagai masalah pertahanan.

Secara epistemologis, pluralitas objek menuntut pluralitas metode. Halkis menghubungkan filsafat dengan rasionalisme, empirisme, konstruktivisme dan fenomenologi; defence studies kontemporer juga menggunakan pendekatan sejarah, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, geografi dan metode kuantitatif. Karena itu, identitas ilmu pertahanan tidak terletak pada satu metode eksklusif. Identitasnya berada pada

koherensi pertanyaan pertahanan dan disiplin metodologis dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Secara aksiologis, ilmu pertahanan tidak netral terhadap tujuan penggunaan kekuatan. Pertahanan berkaitan langsung dengan keselamatan manusia, kedaulatan, hukum, anggaran publik, teknologi berisiko tinggi dan kemungkinan kekerasan. Oleh sebab itu, efektivitas tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran. Pertanyaan mengenai legitimasi, proporsionalitas, kontrol demokratis, etika teknologi, perlindungan sipil dan kepentingan nasional harus menjadi bagian dari pendidikan dan penelitian. Kajian terbaru dalam kerangka Halkis menunjukkan bahwa pertimbangan etis mengenai proporsionalitas dan diskriminasi menjadi semakin relevan seiring berkembangnya teknologi militer otonom seperti drone, karena filsafat ilmu pertahanan dituntut menilai bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga batas moral penggunaannya (Nugraha Ningsih dkk., 2024). Dimensi aksiologis ini juga ditegaskan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kemampuan dasar bela negara (Aris dkk., 2022).

Kerangka ontologi-epistemologi-aksiologi juga mencegah dua reduksi. Pertama, reduksi teknokratis yang menyamakan pertahanan dengan kemampuan senjata. Kedua, reduksi diskursif yang membahas keamanan tanpa memahami realitas organisasi, teknologi dan penggunaan kekuatan. Ilmu pertahanan yang matang harus mampu mempertemukan keduanya: realitas material kekuatan dan refleksi normatif mengenai tujuan serta batas penggunaannya.

### 3.7 Dari Interdisiplin menuju Transdisiplin

Salah satu temuan konseptual utama penelitian ini adalah bahwa sejarah ilmu pertahanan dapat dibaca sebagai sejarah integrasi pengetahuan. Halkis (2022) menunjukkan bahwa strategi pertahanan bersinggungan dengan humaniora dan ilmu sosial, manajemen pertahanan dekat dengan ilmu sosial, keamanan nasional dapat melibatkan humaniora, sosial dan ilmu terapan, sedangkan teknologi pertahanan

melibatkan ilmu alam dan formal. Struktur tersebut sulit dimasukkan ke satu rumpun konvensional.

Interdisiplin berarti suatu masalah diteliti dengan menghubungkan konsep dan metode beberapa disiplin. Transdisiplin bergerak lebih jauh: problem nyata menjadi titik pusat dan batas disiplin dinegosiasikan sesuai kebutuhan pemecahan masalah. Pertahanan sangat cocok dengan karakter ini. Ancaman siber, misalnya, sekaligus merupakan persoalan teknik komputer, organisasi, hukum, strategi, ekonomi, psikologi dan hubungan internasional. Tidak ada satu disiplin yang dapat memberi penjelasan lengkap.

Namun transdisiplin tidak boleh berarti kehilangan standar. Risiko bidang yang sangat luas adalah semua isu dapat diberi label 'pertahanan' tanpa kriteria yang jelas. Karena itu diperlukan batas konseptual: sebuah penelitian layak ditempatkan dalam ilmu pertahanan ketika ia secara eksplisit menjelaskan hubungan masalah yang diteliti dengan kemampuan negara atau masyarakat politik mempertahankan eksistensi, kedaulatan, kepentingan, keamanan atau kapasitas strategisnya. Batas tersebut cukup terbuka untuk inovasi, tetapi cukup ketat untuk menjaga identitas bidang.

Dengan demikian, paradigma transdisipliner bukan tanda bahwa ilmu pertahanan belum matang. Sebaliknya, ia dapat menjadi karakter keilmuan yang sesuai dengan kompleksitas objeknya, sepanjang integrasi disiplin dilakukan secara metodologis dan bukan sekadar mencampur istilah.

### 3.8 Periodisasi Perkembangan Ilmu Pertahanan Indonesia

Berdasarkan pembahasan di atas, perkembangan ilmu pertahanan Indonesia dapat dirumuskan dalam empat fase analitis. Fase pertama adalah fase pengetahuan perang dan perjuangan mempertahankan negara. Pengalaman revolusi kemerdekaan, operasi militer dan pembentukan angkatan bersenjata menghasilkan pengetahuan praktis, doktrin dan memori strategis. Kajian atas tindakan Pembela Tanah Air (PETA) dalam

kurikulum pendidikan sejarah, misalnya, memperlihatkan bahwa perspektif filsafat pertahanan dapat digunakan untuk membaca ulang pengalaman perjuangan pra-kemerdekaan sebagai sumber pengetahuan strategis, bukan sekadar narasi heroik (Firdaus dkk., 2023). Pada fase ini, legitimasi pengetahuan terutama berasal dari pengalaman dan kebutuhan mempertahankan negara yang baru berdiri.

Fase kedua adalah profesionalisasi pendidikan militer melalui sekolah staf dan komando. Sejak 1950-an dan 1960-an, Seskoad, Seskoal dan Seskoau membangun mekanisme pendidikan tingkat lanjut bagi perwira. Pengetahuan pertahanan mulai diproduksi secara lebih terstruktur melalui kurikulum, doktrin, studi strategi dan pengembangan kepemimpinan. Ini merupakan fase institusionalisasi profesional.

Fase ketiga adalah perluasan pasca-Reformasi. Perubahan hubungan sipil-militer, demokratisasi, globalisasi, terorisme, keamanan maritim, bencana, cyber security dan perkembangan teknologi memperbesar kebutuhan perspektif nonmiliter. Pertahanan semakin sulit dipisahkan dari diplomasi, ekonomi, hukum, teknologi dan masyarakat. Fase ini menciptakan tekanan epistemik untuk memperluas komunitas dan objek kajian.

Fase keempat adalah akademisasi universitas sejak 2009. Pendirian Universitas Pertahanan menyediakan institusi yang memungkinkan pengetahuan pertahanan dikembangkan melalui pendidikan tinggi dan penelitian multidisipliner. Fase ini belum selesai. Tantangannya bergeser dari 'apakah pertahanan dapat menjadi ilmu' menuju 'bagaimana kualitas teori, metodologi, publikasi, jejaring dan dampak kebijakannya dapat ditingkatkan'.

Periodisasi tersebut menunjukkan bahwa sejarah ilmu pertahanan bukan cerita tentang keterlambatan semata. Membandingkan tanggal berdirinya lembaga Indonesia dengan universitas pertahanan negara maju dapat berguna, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan perkembangan ilmu. Setiap negara memiliki hubungan berbeda antara universitas, militer, birokrasi, industri dan masyarakat. Ukuran yang lebih substantif

adalah kemampuan ekosistem tersebut menghasilkan pengetahuan yang kritis, dapat diuji, relevan secara strategis dan terhubung dengan komunitas ilmiah internasional.

### 3.9 Tantangan Konsolidasi Ilmu Pertahanan di Indonesia

Pertama, tantangan konseptual. Ilmu pertahanan perlu terus memperjelas batas antara pertahanan, keamanan nasional, ketahanan nasional, studi strategis dan ilmu militer. Kajian kebijakan pertahanan mutakhir menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan nasional saling berkaitan namun tidak identik: pertahanan lebih berorientasi pada instrumen kekuatan negara, sedangkan keamanan nasional mencakup keutuhan dan kesejahteraan negara, masyarakat serta individu secara lebih luas (Zeligke dkk., 2024). Tumpang tindih tidak harus dihapus, tetapi hubungan konseptual harus dijelaskan. Tanpa itu, penggunaan istilah dapat menjadi terlalu luas dan mengurangi ketajaman analisis.

Kedua, tantangan metodologis. Penelitian pertahanan harus bergerak dari budaya argumentasi berbasis otoritas menuju argumentasi berbasis bukti. Pengalaman pejabat dan praktisi sangat berharga sebagai data dan sumber pengetahuan, tetapi tidak menggantikan prosedur verifikasi. Penguatan metode sejarah, studi kasus, statistik, pemodelan, comparative analysis, wargaming research, legal analysis dan metode digital akan meningkatkan kualitas disiplin.

Ketiga, tantangan hubungan sipil-militer dalam produksi pengetahuan. Pertahanan membutuhkan pengetahuan profesional yang sering bersifat sensitif, tetapi ilmu membutuhkan kritik dan keterbukaan. Solusinya bukan memilih salah satu, melainkan membangun tata kelola pengetahuan: klasifikasi informasi yang proporsional, mekanisme akses penelitian, etika penelitian, dan ruang akademik yang memungkinkan perdebatan tanpa mengganggu kepentingan operasional yang sah.

Keempat, tantangan internasionalisasi. Kerja sama pendidikan dan penelitian pertahanan dapat berfungsi sebagai defence diplomacy sekaligus sarana peningkatan

standar akademik. Pertukaran dosen, joint research, publikasi internasional, konferensi dan komparasi kurikulum akan memperluas horizon keilmuan. Namun internasionalisasi sebaiknya tidak menghasilkan ketergantungan epistemik. Pengalaman strategis Indonesia sebagai negara kepulauan, demokrasi besar, negara nonblok dan negara dengan sistem pertahanan semesta harus menjadi sumber teori dan kasus yang dapat ditawarkan kepada literatur global.

Kelima, tantangan teknologi dan etika. Artificial intelligence, autonomous systems, cyber operations, ruang angkasa dan data mengharuskan ilmu pertahanan bekerja lebih erat dengan sains dan teknik. Pada saat yang sama, teknologi tersebut menimbulkan masalah akuntabilitas, hukum humaniter dan kontrol manusia. Karena itu, perkembangan teknologi justru memperkuat relevansi filsafat ilmu pertahanan: kemampuan teknis harus terus diuji terhadap tujuan politik, hukum dan nilai.

Keenam, tantangan regenerasi komunitas ilmiah. Disiplin tidak dapat bertumpu pada beberapa tokoh atau satu institusi. Diperlukan jaringan peneliti lintas universitas, TNI, kementerian, lembaga riset dan industri; jurnal yang konsisten; basis data; asosiasi akademik; serta pendidikan metodologi yang kuat. Konsolidasi ilmu pertahanan pada akhirnya merupakan proses membangun tradisi kritik yang dapat diwariskan.

#### **4. DISKUSI: MODEL TRANSFORMASI EPISTEMIK ILMU PERTAHANAN**

Hasil penelitian memungkinkan dirumuskannya model transformasi epistemik: Perang -> Ilmu Perang -> Ilmu Militer -> Studi Strategi -> Grand Strategy -> Studi Keamanan -> Defence Studies/Ilmua Pertahanan -> Filsafat Ilmu Pertahanan. Model ini bukan kronologi universal yang harus dilalui semua negara, melainkan alat analitis untuk melihat perluasan pusat perhatian. Pada setiap tahap, unsur sebelumnya tidak menghilang. Taktik tetap penting setelah lahirnya strategi; militer tetap penting setelah berkembangnya keamanan nasional; sejarah perang tetap penting setelah munculnya teknologi digital.



Perubahan utama terletak pada skala dan hubungan antarobjek. Ilmu perang berpusat pada fenomena perang; ilmu militer pada organisasi dan penggunaan angkatan bersenjata; strategi pada hubungan tujuan, cara dan sarana; grand strategy pada koordinasi instrumen kekuasaan nasional; security studies pada ancaman, kerentanan dan objek keamanan yang lebih luas; sedangkan ilmu pertahanan mengintegrasikan pengetahuan tersebut untuk memahami bagaimana negara mempertahankan eksistensi dan kepentingannya.

Filsafat ilmu pertahanan berada pada tingkat reflektif. Ia tidak menggantikan penelitian empiris, melainkan memeriksa asumsi dasar penelitian: apa yang dianggap ancaman, siapa yang harus dipertahankan, pengetahuan apa yang dianggap sah, siapa yang berwenang memproduksinya, dan untuk tujuan apa kekuatan digunakan. Dengan fungsi tersebut, filsafat menjadi mekanisme kritik internal bagi ilmu pertahanan.

Model ini juga mengubah cara menilai posisi Indonesia. Pertanyaan tidak lagi hanya 'mengapa Indonesia terlambat memiliki universitas pertahanan', tetapi 'bagaimana pengalaman strategis Indonesia ditransformasikan menjadi pengetahuan yang dapat diuji, diajarkan, dikritik dan dikembangkan'. Pertanyaan kedua lebih produktif karena menempatkan sejarah nasional sebagai sumber pembentukan ilmu, bukan sekadar ukuran ketertinggalan terhadap negara lain.

Novelty penelitian dengan demikian terletak pada dua hal. Pertama, ia membedakan tiga bentuk institusionalisasi: institusionalisasi pengalaman melalui doktrin, institusionalisasi profesi melalui pendidikan militer, dan institusionalisasi akademik melalui universitas serta komunitas ilmiah. Kedua, ia menunjukkan bahwa ilmu pertahanan Indonesia memperoleh identitas bukan dengan memisahkan diri secara absolut dari disiplin lain, tetapi dengan mengintegrasikan disiplin tersebut melalui problem pertahanan negara yang jelas.

## 5. KESIMPULAN

Sejarah perkembangan ilmu pertahanan di Indonesia tidak dapat direduksi menjadi sejarah pendirian Universitas Pertahanan. Ia merupakan proses panjang transformasi pengetahuan tentang perang, militer, strategi, keamanan, teknologi dan negara. Tradisi klasik menunjukkan tahap rasionalisasi perang sebagai objek pengetahuan; perkembangan ilmu militer dan strategic studies memperluas hubungan antara operasi dan tujuan politik; security studies memperbesar perhatian terhadap ancaman dan kerentanan nonmiliter; sedangkan teknologi modern mendorong integrasi antara ilmu sosial, humaniora, sains dan teknik.

Dalam konteks Indonesia, sekolah staf dan komando merupakan lapisan penting dalam sejarah tersebut karena membangun komunitas pengetahuan profesional sebelum lahirnya institusi universitas pertahanan. Pendirian Universitas Pertahanan pada 2009 kemudian menandai transformasi penting menuju akademisasi: pengetahuan pertahanan memperoleh ruang untuk dikembangkan melalui program akademik, penelitian, publikasi dan interaksi sipil-militer. Namun pendirian institusi tidak identik dengan selesainya pembentukan disiplin.

Kematangan ilmu pertahanan ditentukan oleh kemampuan komunitasnya membangun objek penelitian yang jelas, teori yang dapat diperdebatkan, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sumber yang dapat dikritik, publikasi yang kredibel, dan hubungan produktif dengan praktik kebijakan. Dalam kerangka Halkis, filsafat ilmu pertahanan memberi perangkat ontologis, epistemologis dan aksiologis untuk menjaga koherensi proses tersebut.

Artikel ini menyimpulkan bahwa karakter paling produktif bagi ilmu pertahanan Indonesia adalah interdisipliner dan transdisipliner. Karakter tersebut bukan kelemahan selama integrasi dilakukan berdasarkan masalah, metode dan argumentasi yang transparan. Tantangan ke depan bukan sekadar memperluas nomenklatur program



studi, tetapi memperkuat kualitas ekosistem pengetahuan pertahanan melalui riset kolaboratif, hubungan sipil-militer yang sehat, internasionalisasi, penguasaan teknologi, etika, dan budaya kritik akademik.

Dengan demikian, trajektori ilmu pertahanan Indonesia dapat dirumuskan sebagai pergeseran dari pengalaman mempertahankan negara menuju refleksi ilmiah tentang bagaimana negara seharusnya dipertahankan. Pada titik inilah sejarah, strategi, teknologi dan filsafat bertemu: pertahanan tidak lagi hanya menjadi praktik penggunaan kekuatan, melainkan medan pengetahuan yang terus menguji hubungan antara realitas ancaman, pilihan kebijakan dan nilai yang hendak dipertahankan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Widodo, J. (2019). Pengembangan ilmu pertahanan dalam sistem pertahanan negara Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 5(3), 1-15.
- Aris, T., Mamahit, D. A., & Ras, A. R. (2022). Pemahaman terhadap filsafat ilmu pertahanan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dasar bela negara. *Jurnal Defendonesia*, 6(1), 1-10.
- Banerjee, V., & Webeck, S. P. (2024). Civil-military relations: Through a perilous lens. *Armed Forces & Society*. <https://doi.org/10.1177/0095327X221108198>
- Bruneau, T. C., & Tollefson, S. D. (Eds.). (2006). *Who Guards the Guardians and How: Democratic Civil-Military Relations*. University of Texas Press.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817762>
- Chua, C. (2023). Disruption from above, the middle and below: Three terrains of governance. *Review of International Studies*, 49(1), 37-52. <https://doi.org/10.1017/S0260210522000432>



- Clausewitz, C. von. (1976). *On War* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832).
- Csernaton, R., & Martins, B. O. (2023). Disruptive technologies for security and defence: Temporality, performativity and imagination. *Geopolitics*, 20(3), 849-872. <https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2224235>
- Darmono, B. (2015). Transformasi pendidikan militer menuju pendekatan akademik pertahanan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 87-101.
- Darumaya, T., dkk. (2023). Pemikiran potensial ancaman perang siber di Indonesia: Suatu kajian strategi pertahanan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 299-324.
- Deschaux-Dutard, D. (Ed.). (2021). *Research Methods in Defence Studies: A Multidisciplinary Overview*. Routledge.
- Firdaus, M. F., Sudarya, A., & Deksino, G. R. (2023). Defense philosophy perspectives on the action of the Indonesian Defense Forces Army (PETA) in Blitar in Indonesian history education curriculum. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan*, 9(3).
- Fisher, K. M. (2022). Wartime, professional military education, and politics. *Millennium: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.1177/00471178221122968>
- Freedman, L. (2013). *Strategy: A History*. Oxford University Press.
- Gottschalk, L. (1986). *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Alfred A. Knopf.
- Gray, C. S. (1999). *Modern Strategy*. Oxford University Press.
- Halkis, M. (2022). *Filsafat Ilmu Pertahanan: Suatu Pengantar [Philosophy of Science on Defense: An Introduction]*. Unhan Press, Bogor.
- Hidayat, A., & Prakoso, L. Y. (2020). Peran pendidikan pertahanan dalam pembangunan sumber daya manusia pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1), 45-60.



- Hidayat, S. (2017). Ilmu pertahanan sebagai disiplin ilmu: Perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 1-16.
- Howard, M. (1961). *The Use and Abuse of Military History*. Royal United Services Institution Journal, 107(625), 4-10.
- Keliat, M. (2018). Keamanan nasional dan tantangan multidimensional di Indonesia. *Global & Strategis*, 12(1), 15-30.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Laksamana, E. A. (2011). Civil-military relations in Indonesia after Reformasi. *Asian Security*, 7(2), 151-170. <https://doi.org/10.1080/14799855.2011.585754>
- Libel, T., & Ateş, B. (2025). Academic-military relations in U.S. and allied professional military education organizations, 1991-2024: A comparative analysis and proposed typology. *Armed Forces & Society*. <https://doi.org/10.1177/0095327X251371307>
- Luttwak, E. N. (2001). *Strategy: The Logic of War and Peace* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Mahmud, A. (2016). Pendidikan Sesko TNI sebagai fondasi pengembangan pemikiran strategis. *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 2(1), 33-48.
- Makmur, S., & Hadi, S. (2020). Defense policy and strategic environment in Indonesia. *Journal of Defense Resources Management*, 11(1), 45-60.
- Mamahit, D. (2015). Membangun kajian pertahanan negara melalui pendekatan multidisipliner. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 1-14.
- Midhio, I. W., & Priyono, J. (2019). Education and research as components of Indonesia defense diplomacy. *Jurnal Pertahanan*, 5(1), 61-70. <https://doi.org/10.33172/jp.v5i1.487>
- Murray, W., & Millett, A. R. (Eds.). (1996). *Military Innovation in the Interwar Period*. Cambridge University Press.



- Nugraha Ningsih, D. A., Halkis, M., & Susanto, R. (2024). Pertimbangan etika dalam pengembangan teknologi militer: Tinjauan filsafat ilmu pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 418-429.
- Posen, B. R. (1984). *The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between the World Wars*. Cornell University Press.
- Prakoso, L. Y., & Salim, A. (2021). Ilmu pertahanan sebagai disiplin keilmuan multidisipliner. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 7(2), 89-105.
- Rachman, A., Umasih, & Yanuardi, M. H. (2020). Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD): Doktrin dan implementasi lewat Seminar Angkatan Darat 1965-1974. *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 2(1), 1-12.
- Ristekdikti. (2017). *Klasifikasi Bidang Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Rizal, S. (2019). Kurikulum Sesko TNI dan kontribusinya terhadap pembangunan pertahanan nasional. *Jurnal Wira Bhakti*, 6(1), 55-70.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Sloan, E. (2002). *The Revolution in Military Affairs: Implications for Canada and NATO*. McGill-Queen's University Press.
- Subagyo, A. (2016). Tantangan pengembangan sumber daya manusia pertahanan di Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 6(3), 45-60.
- Sun Tzu. (1963). *The Art of War* (S. B. Griffith, Trans.). Oxford University Press.
- Thucydides. (1996). *The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War* (R. B. Strassler, Ed.). Free Press.
- Triantama, F., & Pangestu, Y. (2020). Revolution in Military Affairs: Strategi menghadapi strategic disadvantage Singapura. *Nation State: Journal of International Studies*, 3(2), 196-207. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2020v3i2.332>



- Universitas Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Profil dan Kurikulum Pendidikan Universitas Pertahanan. Unhan RI.
- Walt, S. M. (1991). The renaissance of security studies. *International Studies Quarterly*, 35(2), 211-239.
- Williams, P. D. (Ed.). (2013). *Security Studies: An Introduction* (2nd ed.). Routledge.
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Zeligke, F., Kurniawan, S. E., & Ginting, W. (2024). Kebijakan pertahanan untuk mencapai sistem keamanan nasional. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10085>